

**PEREMPUAN DAN PERDAGANGAN IKAN LAUT DI PESISIR BESUKI
KABUPATEN SITUBONDO JAWA TIMUR**

Oleh:

Rina Rohmawati, S.S, M.Hum
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Argopuro Jember
Email : rina.manis@gmail.com

Mohamad Il Badri, S.S.,M.Hum
Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Argopuro Jember
Email : il.badri@yahoo.com

Abstrak

Keterlibatan perempuan menjadi biasa dan bukan masalah hanya demi untuk terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Perempuan ikut terlibat dalam perdagangan hasil tangkap ikan. Perempuan berbondong di tepian dermaga untuk mengambil ikan hasil tangkapan para nelayan laki laki yang umumnya adalah suami-suami nelayan perempuan. Dengan berbekal timbangan kecil para perempuan berkerumun di TPI pada dini hari, umumnya masyarakat pesisir menyebutnya *Reng Timbangan*. Aktifitas perdagangan pada dini hari terlihat sudah umum dalam masrakat di kalangan perempuan nelayan Pesisir Besuki. Mereka terlibat aktif untuk mempertahankan perekonomian keluarga dengan bentuk kerja sama yang sangat hebat. Tidak ada istilah tabu dalam peran ini, sebab mereka memahami bagaimana dapat bekerja dengan memperoleh hasil maksimal untuk kelangsungan hidup rumah tangga nelayan tradisional. Kajian ini menarik menurut penulis sebab tidak semua wilayah pesisir memiliki keunikan dalam peran perempuan yang ikut terlibat dalam perdagangan ikan meski hanya dalam kapasitas yang kecil. Peran ekonomi rumah tangga nelayan yang sudah disepakati dengan tujuan untuk keberlangsungan ekonomi rumah tangga nelayan sederhana.

Kata Kunci : *Reng Timbangan, Rumah Tangga Nelayan, Ekonomi Nelayan*

Abstract

The involvement of women becomes ordinary and not a problem just for the sake of fulfilling the needs of everyday life. Women are involved in the trading of fish catch. Women are huddled on the banks of the pier to collect fish catches of male fishermen who are generally husbands of female fishermen. Armed with small scales of women clustered in the TPI in the early morning, generally coastal communities call it Reng Timbangan. Trading activity in the early morning appears to have been common in the masrakat among the coastal fishermen of Besuki. They are actively involved in maintaining the family economy with a great form of cooperation. There is no taboo in this role, because they understand how to work by obtaining maximum returns for traditional household fisherman survival. This study is interesting according to the authors because not all coastal areas are unique in the role of women who are involved in fish trade even in small capacity. The economic role of fishermen households that have been agreed with the aim for the economic sustainability of fishermen households is simple.

Keywords: *Reng Timbangan, Fisherman Household, Fisherman Economy*

Pendahuluan

Wilayah Pesisir dalam konteks bentang alam merupakan merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan. Selain itu, wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif serta memberikan nilai ekonomi yang luar biasa terhadap manusia. Sejalan dengan penambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial-ekonomi, “nilai” wilayah pesisir terus bertambah. Konsekuensi dari tekanan terhadap pesisir ini adalah masalah pengelolaan yang timbul karena konflik pemanfaatan yang timbul akibat berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir (Firial Maharudin dan Ian R. Smith, 1986: 43-60).

Begitu juga halnya dengan wilayah Indonesia. Sebagai negara yang dikelilingi oleh laut, hampir semua propinsi di Indonesia memiliki perairan laut. Melihat keadaan geografis yang demikian dapat diartikan bahwa Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai daerah perikanan laut tak kurang dari 6,85 juta km² dan diperkirakan daerah seluas itu memiliki kandungan produksi ikan 10

juta ton pertahunnya (*Statistik Perikanan Indonesia*, 1998:3). Sayangnya dengan potensi kelautan yang seluas itu, masyarakat belum bisa memaksimalkan produksi perikanan (Don K. Emmerson, 1997: 19). Kondisi ini tidak lepas dari paradigma pembangunan yang lebih memprioritaskan masyarakat perkotaan dan pertanian pedalaman, sedangkan masyarakat pesisir kurang diperhatikan.

Selama ini studi tentang perubahan sosial masyarakat pesisir dan nelayan di daerah pesisir utara dalam perspektif sejarah lokal masih jarang ditulis oleh para sejarawan. Hal ini berbeda dengan studi tentang perubahan sosial masyarakat petani dan buruh di daerah-daerah pedalaman yang sudah banyak dikaji. Sifat sumber daya perikanan laut yang terbuka (*open acces*) bagi siapapun untuk mengelola dan memanfaatkannya menjadi salah satu penyebab masyarakat pesisir hidup dalam ketidakpastian untuk mencukupi kebutuhan subsisten ekonomi mereka (Garet Hardin, 2002: 119). Berbeda dengan sifat sumber daya pertanian yang tertutup (*close acces*) yang mana petani mempunyai hak penuh atas lahan pertanian yang dimiliki, sehingga bisa mengkalkulasi pendapatan yang diperoleh. Kehidupan ekonomi petani memiliki perhitungan yang tepat dan rumit, pengeluaran akan selalu diukur

dengan hasil yang diperoleh. Apabila petani salah dalam memperhitungkan, maka merupakan bencana bagi kehidupan mereka. Oleh karena itu, kehidupan ekonomi petani cenderung pada hal-hal yang statis dan mapan serta tidak mengambil resiko yang membahayakan (James C. Scott, 1983), Samuel L. Popkin, 1986).

Pada dasarnya, laut sebagai sumber daya primer bagi masyarakat nelayan yang tidak dapat memberikan kepastian pendapatan. Kegiatan menangkap ikan di laut bagi nelayan ibarat orang “bermain judi”, ada kalanya pada waktu tertentu penghasilan tinggi dan melimpah, tetapi di lain waktu mereka tidak mendapatkan hasil apapun, sehingga harus menanggung kerugian modal usaha yang dikeluarkan. Manakala penghasilan tinggi maka nelayan cenderung boros dan berfoya-foya, akan tetapi ketika tidak mendapatkan hasil, maka nelayan akan menjual barang yang dimiliki atau berhutang kepada *juraghan* dan orang lain yang dianggap dapat membantu. Menjual barang dan berhutang merupakan bagian dari upaya nelayan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi yang serba tidak menentu. Pola hidup demikian merupakan bagian dari nelayan dalam menyiasati karakteristik sumber daya laut (Adzkiyak, 2008: 2).

Keadaan seperti ini tidak jauh beda dengan kondisi para nelayan yang ada di Pesisir Besuki. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat pesisir mengandalkan hidupnya dengan jalan menjadi nelayan. Setiap hari mereka harus bertarung dalam ketidakpastian antara mendapatkan hasil tangkapan atau tidak. Seperti halnya para nelayan di daerah lain, tingkat kesejahteraan ekonomi para nelayan Pesisir Besuki jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk sudah terlihat lemah.

Periode kekuasaan kolonial Belanda di Jawa dengan segala kebijakan telah memberikan pengalaman hidup bagi masyarakat Pesisir, khususnya nelayan. Kebijakan pemerintah kolonial Belanda pada 1850-1880 tentang sistem sewa dan penerapan wajib pajak terhadap hasil tangkapan, hal ini dirasa sangat membebani kehidupan mereka. Kebijakan sistem sewa yang terapkan pemerintah kolonial di sektor penangkapan ikan memberikan keleluasaan bagi pengusaha Cina atau *pachter* untuk mengelola usaha perikanan laut (Kusnadi, 2000: 96). Para *pachter* memiliki lisensi dari pemerintah kolonial Belanda untuk memberikan pinjaman peralatan alat tangkap dan modal usaha pada nelayan yang hidup di sepanjang Pantai Utara Jawa (Masyhuri, 1996: 87-90).

Pinjaman modal usaha, perahu, dan peralatan tangkap oleh *pachter* kepada nelayan merupakan hubungan timbal balik yang menguntungkan kedua belah pihak. Nelayan diuntungkan sebab dapat menangkap ikan dengan biaya dari *pachter* sedangkan *pachter* merasa untung dengan hasil tangkap ikan nelayan yang dijual kepadanya. Pola ini sekaligus sebagai bentuk pelunasan pinjaman peralatan tangkap nelayan kepada *pachter*. Meski demikian nelayan merasa untung sebab hasil tangkapan melimpah sehingga dapat melunasi pinjaman kepada *pachter* dan akhirnya nelayan memiliki alat tangkap sendiri (Masyhuri, 1996: 80).

Pada tanggal 1 januari 1863, secara resmi kebijakan sistem sewa di sektor penangkapan ikan diganti oleh pemerintah Belanda dengan sistem pajak atas kepemilikan perahu. Kebijakan ini juga diberlakukan kepada nelayan biasa yang hanya bekerja sebagai *pandega* (Kusnadi, 1998: 1). Pada waktu yang bersamaan, pemerintah juga menerapkan kebijakan menaikkan harga garam yang menjadi bahan baku industri pengasinan ikan. Perubahan kebijakan ini memunculkan berbagai persoalan dalam kehidupan nelayan, khususnya dalam hal modal usaha. Sebelumnya nelayan merasa mudah mendapatkan modal dari para *pachter*, kemudian menjadi sulit didapat. Hal ini

berakibat usaha penangkapan perikanan lepas pantai bergeser ke pesisir pantai. Kewajiban ini berlangsung sampai akhir kekuasaan kolonial di Hindia Belanda.

Menjelang akhir pemerintahan kolonial Belanda tahun 1930-an telah terjadi peristiwa depresi ekonomi, semua aspek perekonomian mengalami penurunan mulai dari ekonomi perdagangan, ekonomi petani dan buruh. Bagi nelayan Pesisir yang hidup pada masa tersebut merasakan pengaruh depresi ekonomi yang terjadi (Soegianto Padmo, 2004: 205). Masa depresi ekonomi ditandai dengan naiknya harga kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, minyak tanah, minyak goreng, gula dan lain sebagainya yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat Pesisir. Turunnya daya beli dan melambungnya harga berbagai kebutuhan hidup menyebabkan kemiskinan terus bertambah pada masyarakat nelayan. Di sektor industri, terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan akibat kelesuan usaha (Pieter Creutzberg dan J.T.M Van Laen, 1987: 118-120).

Tahun 1942 ketika kekuasaan berada di bawah pemerintahan Jepang, kondisi kemiskinan nelayan Pesisir semakin tambah parah. Kebutuhan rakyat

akan sandang, pangan dan papan tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan semakin sengsaranya rakyat. Kondisi seperti ini berpengaruh pada usaha penangkapan ikan rakyat. Secara ketat Jepang melakukan pengawasan perikanan rakyat. Tentara Jepang ditugaskan untuk mengawasi tempat pendaratan ikan yang digunakan sebagai transaksi jual beli tangkapan ikan, selain itu Tentara Pendudukan Jepang juga menarik pajak yang tinggi. Tindakan sewenang-wenang tentara Jepang menyebabkan kemiskinan dan penderitaan bagi kehidupan rakyat waktu itu (Suhartono W. Pranoto, 2001:158).

Pada tahun 1945, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan membebaskan diri dari penjajahan bangsa asing, kondisi perikanan rakyat juga belum membaik. Selama masa revolusi, daerah-daerah pantai utara, terutama Pesisir Besuki, merupakan daerah yang paling parah dalam tingkat kebutuhan ekonomi pangan. Kebutuhan bahan pangan pokok, yaitu beras sangat langka sekali. Hal dipengaruhi oleh minimnya penduduk yang menyandarkan hidupnya pada pengolahan lahan persawahan, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus memakan makanan ubi-ubian atau kadang-kadang makan hasil tangkapan yang diperoleh secara minim.

Sejak pengakuan kedaulatan pada tahun 1949, rezim Orde Lama memegang usaha tampuk pemerintahan. Permasalahan kemiskinan yang melanda daerah-daerah Pesisir utara menjadi bahan pertimbangan. Namun begitu segala kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengatur dan mengentaskan kemiskinan di daerah Pesisir, tetap tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Kondisi para nelayan daerah Pesisir tetap sama dengan waktu-waktu terdahulu. Pada akhir masa pemerintahan Orde Lama, yaitu tahun 1964 menjelang peristiwa kudeta, telah terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan kemiskinan di kalangan keluarga nelayan dan petani kecil semakin parah (Irwan Abdullah dan Abdul Arif Saleh, 2001:v-xv). Para nelayan Pesisir tetap dengan kondisinya yang semula. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya, mereka tidak mampu untuk memaksimalkan daya kerja karena peralatan alat tangkap dan perahu yang sudah memasuki usia tua. Usaha-usaha pemerintah yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan keluarga nelayan tidak sampai menjangkau dalam tataran bawah.

Sehingga keterlibatan perempuan menjadi biasa dan bukan masalah hanya demi untuk terpenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari. Perempuan ikut terlibat dalam

perdagangan hasil tangkap ikan. Perempuan berbondong di tepian dermaga untuk mengambil ikan hasil tangkapan para nelayan laki laki yang umumnya adalah suami-suami nelayan perempuan. Dengan bekal timbangan kecil para perempuan berkerumun di TPI pada dini hari. Seperti pada gambar berikut ini:



Gambar di atas merupakan aktifitas *Reng Timbengan* (orang timbangan) pada pukul 02.00 dini hari di TPI. Aktifitas Reng Timbengan adalah umumnya perempuan-perempuan istri nelayan-nelayan pesisir Besuki yang melakukan perdagangan ikan pada dini hari dengan membawa timbangan kecil. Hal ini marak dilakukan oleh perempuan-perempuan nelayan untuk membantu suami mereka memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Kegiatan ekonomi yang menggairahkan sebab hal ini memang sudah terjadi di kehidupan keluarga nelayan pesisir. Mereka memiliki hubungan kerja dan kontrak kerja dengan para *reng timbengan* sebab biasanya mereka (nelayan tradisional) melakukan

akad pinjam meminjam, ataupun jual beli dengan reng timbengan. Sehingga hasil tangkap ikan langsung disetor pada reng timbengan untuk diperdagangkan. Karena alat sederhana dengan kapasitas yang minim reng timbengan menjual ikan tidak dalam jumlah yang besar melainkan skala kecil kurang lebih 10-15 kilogram ikan perhari.



Aktifitas perdagangan pada dini hari terlihat sudah umum dalam masyarakat di kalangan perempuan nelayan Pesisir Besuki. Mereka terlibat aktif untuk mempertahankan perekonomian keluarga dengan bentuk kerja sama yang sangat hebat. Reng Timbengan menjual ikan biasanya dari hasil tangkap nelayan dengan alat sederhana seperti, kail dan jala memperoleh hasil tangkap ikan tidak dalam jumlah yang banyak kurang lebih 10-15 kg itupun kalau beruntung, kalau tidak mendapatkan hasil tangkapan dengan jumlah yang minim atau kadang tidak memperoleh satu apapun. Sebab mencari ikan dilaut ibarat orang “bermain judi”,

ada kalanya pada waktu tertentu penghasilan tinggi dan melimpah, tetapi di lain waktu mereka tidak mendapatkan hasil apapun, sehingga harus menanggung kerugian modal usaha yang dikeluarkan.

Selain sebagai reng timbangan, biasanya istri – istri nelayan juga memanfaatkan waktu mereka untuk membuat usaha kecil untuk memperoleh penghasilan seperti memindang ikan. Jika hasil tangkap ikan yang diperoleh di jual reng timbangan tidak laku, mereka mengolah ikan tersebut menjadi ikan asin atau pengasapan supaya ikan tersebut awet dan dapat dijual kembali. Meskipun Pesisir Besuki telah berkembang industri pengolahan ikan, seperti pemindangan, tetapi industri pengolahan ikan masih terbilang kecil/industri rumah tangga (*home industri*). Hal ini sangat menarik untuk di kaji menurut penulis, untuk memperkaya pengetahuan terutama dalam bidang kemasyarakatan Indonesai. khususnya pada era modernisasi sekarang ini ternyata masih ada peran perempuan nelayan berjuang dalam mempertahankan ekonomi keluarga dengan istilah reng timbangan.



Pembahasan

Dalam masyarakat Jawa, ada stereotip negatif terhadap perempuan dapat dilihat pada ungkapan *swarga nunut neraka katut* atau *kanca wingking*. Karena nasib perempuan sangat bergantung pada suami maka kedudukan perempuan dipandang lebih rendah. Perannya dibatasi pada tugas-tugas domestik, yaitu sekitar sumur, dapur dan kasur (Kusnadi, (dkk.), 2006). Peranan yang demikian adalah peranan yang ideal sebagai perempuan. Pandangan demikian masih berakar kuat pada sebagian masyarakat Jawa dan penolakan terhadap stereotip negatif tersebut terus berlangsung seiring dengan meningkatnya gerakan emansipasi.

Peranan domestik perempuan adalah peranan sosial yang terkait dengan aktifitas internal rumah tangga seperti memasak, mengurus anak dan melayani suami. Sedangkan peranan publik adalah peranan sosial yang berkaitan dengan aktivitas sosial, ekonomi dan politik diluar rumah tangga. Jika kedua peran tersebut

dilakukan oleh seorang perempuan artinya ia memainkan peranan ganda.

Pada umumnya, motivasi perempuan untuk bekerja di ranah publik di dasari oleh kepentingan ekonomi rumah tangga, mendapat kemandirian, belajar menghadapi tantangan sosial ekonomi dan untuk meningkatkan status dalam masyarakat. Kebebasan ekonomi seorang perempuan bukanlah fungsi dari ia bekerja dalam sektor publik, hal ini karena ia mendapatkan penghasilan yang teratur dan dapat diandalkan (Kusnadi, (dkk.), 2006:7). Bagi rumah tangga miskin, penghasilan seorang perempuan dari usaha ekonomi memberikan kesempatan untuk memegang peranannya yang penting dalam ekonomi rumah tangga. Sehingga *reng timbengan* atau orang timbangan menjadi alasan kuat untuk ikut berperan dalam ekonomi rumah tangga nelayan.

Kedudukan perempuan berkaitan dengan derajat otoritas kekuasaan yang dimiliki di ranah domestik atau publik. Untuk memahami status perempuan di dalam atau di luar rumah tangga, harus terlebih dul megnidentifikasi distribusi dan alokasi keuangan, serta sistem pembagian kerja yang berlaku didalamnya. Kekuasaan dinyatakan sebagai kemampuan untuk mengambil keputusan yang mempegaruhi kehidupan

suatu keluarga antara suami dan istri (Kusnadi, (dkk.), 2006:8).

Simpulan

Sejak pemerintah Orde Baru memegang tampuk pemerintahan berbagai program untuk menjalankan rencana apa yang dinamakan ‘pembangunanisme’ mulai dijalankan. Pembangunan ini merasuk sampai ke daerah-daerah pinggiran. Salah satu program pembangunan yang membawa dampak perubahan sosial ekonomi adalah ‘revolusi biru’. Apa yang dituju oleh pemerintah sebenarnya adalah ingin meningkatkan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan yang banyak melanda daerah-daerah pinggiran. Akan tetapi, Modernisasi alat tangkap ikan dan motorisasi perahu atau yang biasa disebut dengan istilah ‘revolusi biru’ ini secara tidak langsung membawa dampak yang besar bagi perubahan sosial ekonomi masyarakat nelayan, sehingga batas antara modern dan tradisional menjadi semakin jelas. Dalam arti lain, kehidupan sosial ekonomi nelayan tradisional orientasi utama mencari ikan adalah untuk memenuhi kebutuhan subsisten ekonomi keluarganya, dan kalau ada sisa ikan hasil tangkapan biasanya dijual untuk keperluan lain yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga lainnya. Namun sejak diperkenalkanya revolusi biru, kebutuhan subsisten keluarga nelayan semakin luas

pengertiannya yang tidak hanya meliputi untuk memenuhi makan dan minum sehari-hari, tetapi juga meliputi kebutuhan-kebutuhan lainnya, seperti uang jajan anak-anak, biaya sekolah untuk anak-anak, televisi, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya. Guna memenuhi segala kebutuhan rumah tangga tidak cukup hanya mengandalkan hasil tangkapan ikan yang sedemikian itu, sehingga dengan hal ini orientasi nelayan mulai berubah untuk mengeksploitasi hasil dengan sebanyak-banyaknya demi sebuah keuntungan yang nantinya bisa digunakan untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga nelayan. Berbagai permasalahan sosial dalam masyarakat nelayan Pesisir mulai muncul ke permukaan ketika motorisasi dan modernisasi alat tangkap ikan mulai diperkenalkan.

Pada masa sebelum diperkenalkannya perahu motor tahun 1974, nelayan biasa mencari ikan di malam hari di mana angin darat sedang bertiup, namun sejak diperkenalkannya perahu motor mereka bisa mencari ikan di siang hari juga. Hal ini secara tidak langsung berbenturan dengan kebiasaan masyarakat nelayan setempat yang akhirnya menimbulkan gejolak sosial. Gejolak sosial ini dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran kaum tua nelayan yang berasumsi bahwa menentang

kebiasaan setempat (adat setempat) akan menimbulkan bencana (*ecapok tola*), di mana kekhawatiran kaum nelayan tua adalah habisnya ikan akibat eksploitasi yang terus-menerus sehingga mengganggu ekosistem laut. Sementara itu bagi kaum nelayan pemilik perahu motor mereka berpandangan untuk meningkatkan hasil pendapatan harus dirubah sistem penangkapan yang hanya mengandalkan tenaga alam. Oleh karena itu para nelayan pemilik perahu motor membiarkan suara-suara sumbang yang diteriakkan kaum nelayan tua (tradisional). Seiring dengan berjalannya waktu nelayan Pesisir mulai terbiasa dengan perubahan kebiasaan tersebut.

Sembilan tahun kemudian gejolak sosial muncul kembali ke permukaan ketika alat tangkap ikan yaitu jaring *purse seine* mulai diperkenalkan kepada nelayan Pesisir tahun 1983. Kembali gejolak sosial ini di dorong oleh ketidakmampuan nelayan tradisional dalam mengakses alat tangkap ikan yang baru ini, karena harganya tidak dapat terjangkau oleh mereka. Alasan yang utama dalam penentangan penggunaan jaring *purse seine* adalah eksploitasi pemilik alat tangkap baru ini sehingga nelayan yang tidak memiliki alat tangkap baru ini tidak bisa bersaing dalam hal penangkapan ikan. Lima tahun kemudian gejolak sosial

muncul lagi ke permukaan ketika lampu *mercury* diperkenalkan tahun 1988 guna menggantikan lampu *strongking* yang biasa digunakan nelayan Pesisir.

Akibat diperkenalkannya motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap ikan adalah semakin terlihatnya jenjang tingkat ekonomi antara nelayan pemilik dengan nelayan buruh. Kehidupan sosial ekonomi nelayan pemilik ditandai dengan tingginya status sosial yang dimiliki akibat adanya kepemilikan perahu yang menjadi sandaran hidup nelayan buruh, sehingga tingkat ketergantungan ekonomi nelayan buruh semakin kuat terhadap nelayan pemilik perahu. Meskipun dalam penelitian ini hubungan nelayan pemilik dengan nelayan buruh bersifat longgar, di mana hubungan tersebut diikat dengan hutang-piutang antara nelayan buruh terhadap nelayan pemilik. Akan tetapi, hubungan tersebut tetap membawa pengaruh terhadap tingginya status sosial nelayan pemilik di mata nelayan buruh, karena mereka menjadi sandaran untuk dimintai pertolongan di kala kehidupan rumah tangganya mengalami kebutuhan ekonomi yang sangat mendesak. Semakin banyak perahu yang dimiliki seorang nelayan semakin banyak pula anak buah yang bekerja di perahunya.

Dengan melihat perubahan sosial ekonomi akibat kebijakan motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap ikan di Pesisir tahun 1974-1998, sangat jelas bahwa perubahan sosial akibat masuknya revolusi biru yang berjalan seiring dengan masuknya motorisasi perahu dan modernisasi alat tangkap ikan tidak diantisipasi terlebih dahulu oleh pemerintah, sehingga tujuan pemerintah yang ingin mengentaskan kemiskinan daerah Pesisir tidak mencapai sasarannya secara tepat. Justru yang terjadi adalah semakin terpuruknya ekonomi subsisten keluarga nelayan tradisional di tengah-tengah perubahan sosial ekonomi yang sedang mereka dihadapi.

Relevansi yang menunjukkan adanya pengaruh modernisasi terhadap perubahan struktur sosial masyarakat telah banyak dipublikasikan. Namun studi tersebut, kebanyakan masih bertumpu pada kasus masyarakat agraris dimana pertanian padi-sawah dominan, seperti yang dilakukan oleh Frans Husken dalam penelitiannya tahun 1998, ia menjelaskan bahwa masyarakat agraris dalam konteks ekologi padi-sawah telah mengalami modernisasi namun masih merupakan representasi masyarakat dengan cara produksi sederhana atau industri pedesaan yang belum berkembang, sehingga

dinamika formasi sosial juga belum terlalu tinggi.

Daftar Pustaka

Arsip dan Laporan Pemerintah

Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang berupa *Visserijnieuws* (Berita Perikanan) April 1949, 1e Jaargang No. 2.

Onderzoek Naar De Mindere Welvaart, Inlandsche Bevolking Op Java en Madoera, Batavia 1905

De Viscvangst-Op Madoera, Djava Tijdschrift Van Het Java Instituute, Tahun 1926

Arsip Daerah Propinsi Jawa Timur yang berupa Himpunan Undang-Undang, Peraturan-Peraturan, dan Surat-Surat Keputusan tentang Kapal-Kapal Motor Penangkap Ikan Jawa Timur, Tahun 1968-1976

Statistik Perikanan Jawa Timur Tahun 1974-1998: Arsip Daerah Kabupaten Situbondo yang berupa Laporan Evaluasi Pembangunan Perikanan Kabupaten Situbondo Tahun 1974-1998

Kecamatan Besuki Dalam Angka Tahun 1974-1998; Buku Monografi Desa Pesisir Tahun 1974-1998.

Monografi Desa Pesisir Tahun 1974-1998 Laporan KUD Mina Waspada Fajar Laut, Besuki 1978-1998

Buku, Artikel dan Makalah

Abdurrahman, 1988, *Sejarah Madura Selayang Pandang*, cetakan kelima, Sumenep: Matahari.

_____, 1977, *Sekelumit Cara Mengenal Masyarakat Madura*, Jakarta: Proyek Penelitian Madura Kerjasama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dengan Pemerintah Belanda.

Adzkiyak, 2008, *Perubahan Sosial-Ekonomi Nelayan Lamongan Selama Periode 1930-1965*, Tesis S2, Yogyakarta: Program Studi Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gajah Mada.

Ahmad Erani Yustika, 2003, *Negara vs Kaum Miskin* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Ahmad M Sewang, 2005 *Islamisasi Kerajaan Gowa; Abad XVI Sampai ke XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

A.M. Djuliaty Suroyo, dkk., 2007. *Sejarah Maritim Indonesia I Menelusuri Jiwa Bahari Bangsa Indonesia Hingga Abad ke-17*, Pusat Kajian Sejarah dan Budaya Maritim Asia Tenggara, kerjasama dengan Departemen Kelautan dan Perikanan RI dan Jeda: Semarang.

Andang Subahariyanto (dkk.), 2004, *Tantangan Industrialisasi Madura; Membentur Kultur, Menjunjung*

- Leluhur, Malang: Bayumedia Publishing.
- Azyumadi Azra, 1994, *Jaringan Ulama: Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan Abad XVIII*, Bandung: Mizan.
- Bailey, Conner, 1988, "Mengelola Sumberdaya yang Terbuka; Kasus Penangkapan Ikan di Daerah Pantai", dalam, D.C. Korten dan Sjahrir (eds.), *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- _____. A. Dwiwonggo, dan F. Marahudin, 1987, *Indonesian Marine Capture Fisheries*, Manila: ICLARM.
- Bambang Samsu, 2003, "Rumah, Tanah, dan Leluhur di Madura Timur", dalam Soegianto (peny.), *Kepercayaan, Magi, dan Tradisi dalam Masyarakat Madura*, Jember, Tapal Kuda.
- Budi Siswanto, 2008, *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*, Surabaya: Laksbang Mediatama.
- Ciriasy, S.V, Wantrup dan Richard C. Bishop, 1986, "Milik Bersama Sebagai Suatu Konsep Kebijaksanaan Sumber Daya Alam", dalam Firial Maharudin dan Ian R. Smith (ed.), *Ekonomi Perikanan; Dari Teori Ekonomi ke Pengelolaan Perikanan*, Jakarta: Gramedia.
- William L. Collier, "Employment and Income in Coastal Villages on The North Coast of Java", dalam, *Masyarakat Indonesia 2 Thn. 1975*
- De Jonge, Huub, 1989, *Madura Dalam Empat Zaman: Pedagang, Perkembangan Ekonomi, Dan Islam; Suatu Studi Antropologi Ekonomi*, (Jakarta: kerjasama Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan PT. Gramedia.
- _____, 2003, "Lebih Baik Putih Tulang Daripada Putih Mata: Tindakan Menolong Diri Sendiri Dengan Kekerasan Dalam Masyarakat Madura", dalam Frans Husken dan Huub de Jonge (eds.), *Orde Zonder Order; Kekerasan dan Dendam di Indonesia 196-1998*, Yogyakarta: LKiS,